

OPTIMALISASI PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNTUK MENCIPTAKAN MAHASISWA UNGGUL

Oleh : Sumaryanto *)

ABSTRACT

Essentially, the issues of collegian activities guidance were in increasing of their qualities. The impowerment of collegian for the academy were belong to the important way to did. As the strategically institution that producing the nation leader candidates, besides providing the academically insight in its field, in the right way that the institution was creating a conducive environment that aimed in the growing of collegian's social life in the scientifically insight cultural.

In the academy, learning process that containing the regularly college activities that included in the field of academically activities were becoming a primary service in collegian activities which were pressed in point of the agile of intelligently collegian. In addition, there were the kind service that provide by academy that was providing the vehicle for the collegians in their organization activities to actualize of their talent, interest and ability that was belonged that aimed of their optimal development.

The optimalization of collegian activities or extracurricular activities was implemented in the way of (1) determining of col-

*) Staf Pengajar Prodi Ilmu Keolahragaan FIK UNY

legian activities priority with Analytical Hierarchy Process to obtain the rationally activities and properly implemented, (2) the collegian guidance pattern was implemented in synergogy. In such two ways, it was expected that collegian obtained their sufficient extracurricular experiences, with the result that they be able to adjusting and managing organization. These experiences was integrated to the result of studying process in the college with the result to producing the excellence collegians, that were able to achieving their performance in academically area, in experiencing in extracurricular area (collegian organization) and be able to achieving the nationality goals.

Keywords: Analytical Hierarchy Process, synergogy, excellent collegian.

PENDAHULUAN

Memasuki milenium baru dalam hal pemberdayaan mahasiswa, kebijakan perguruan tinggi bertujuan agar mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pada masa yang akan datang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) menjadi sumber penggerak utama kemajuan kehidupan masyarakat. Konsep dasar paradigma baru kebijakan pembinaan kemahasiswaan perguruan tinggi terletak pada ukuran mutu dengan empat aspek, yakni otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Implementasi paradigma tersebut mensyaratkan pendampingan/pembinaan mahasiswa dengan menggunakan metode partisipatif dalam pelaksanaan berbagai program sehingga dapat berlangsung secara demokratis dan efektif.

Dalam wawasan kemahasiswaan, sosok mahasiswa adalah insan yang memiliki berbagai dimensi. Mahasiswa adalah bagian dari civi-

tas akademika dan bagian dari generasi muda bangsa yang terlatih untuk mengembangkan penalaran, pelaku sejarah yang ikut berperan dan menentukan sejarah perkembangan bangsa. Selain itu, mahasiswa juga merupakan warga negara Indonesia yang hak dan kewajibannya sama dengan warga negara Indonesia lainnya (Sudarsono, 2002:2).

Agar mahasiswa mampu menjadi sarjana yang sujana, mereka perlu dibekali kemampuan akademik dan organisasi baik intra maupun antarperguruan tinggi. Organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa menuju perluasan wawasan, peningkatan kecendekiaan, serta pengembangan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah dan pemahaman tentang arah profesi serta sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan (Depdikbud, 1998).

Dalam tulisan ini akan dikaji upaya-upaya optimalisasi pembinaan kegiatan kemahasiswaan agar kegiatan tersebut mampu meningkatkan kualitas mahasiswa, khususnya di bidang non-akademik. Peningkatan kualitas tersebut mengarah pada terciptanya mahasiswa yang memiliki berbagai kemampuan, di antaranya adalah memiliki kemampuan personal, kemampuan bekerja secara sistematis, kemampuan mengembangkan potensi intelektual, emosional dan spiritual.

PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN DENGAN PROSES HIRARKI ANALITIK

Perguruan tinggi pada hakikatnya adalah lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan calon-calon ilmuwan. Oleh karena ilmu pengetahuan itu digali dari dan hasilnya diterapkan kembali kepada lingkungan, dengan sendirinya perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Dengan demikian, perguruan tinggi

legian activities priority with Analytical Hierarchy Process to obtain the rationally activities and properly implemented, (2) the collegian guidance pattern was implemented in synergogy. In such two ways, it was expected that collegian obtained their sufficient extracurricular experiences, with the result that they be able to adjusting and managing organization. These experiences was integrated to the result of studying process in the college with the result to producing the excellence collegians, that were able to achieving their performance in academically area, in experiencing in extracurricular area (collegian organization) and be able to achieving the nationality goals.

Keywords: Analytical Hierarchy Process, synergogy, excellent collegian.

PENDAHULUAN

Memasuki milenium baru dalam hal pemberdayaan mahasiswa, kebijakan perguruan tinggi bertujuan agar mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pada masa yang akan datang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) menjadi sumber penggerak utama kemajuan kehidupan masyarakat. Konsep dasar paradigma baru kebijakan pembinaan kemahasiswaan perguruan tinggi terletak pada ukuran mutu dengan empat aspek, yakni otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Implementasi paradigma tersebut mensyaratkan pendampingan/pembinaan mahasiswa dengan menggunakan metode partisipatif dalam pelaksanaan berbagai program sehingga dapat berlangsung secara demokratis dan efektif.

Dalam wawasan kemahasiswaan, sosok mahasiswa adalah insan yang memiliki berbagai dimensi. Mahasiswa adalah bagian dari civi-

tas akademika dan bagian dari generasi muda bangsa yang terlatih untuk mengembangkan penalaran, pelaku sejarah yang ikut berperan dan menentukan sejarah perkembangan bangsa. Selain itu, mahasiswa juga merupakan warga negara Indonesia yang hak dan kewajibannya sama dengan warga negara Indonesia lainnya (Sudarsono, 2002:2).

Agar mahasiswa mampu menjadi sarjana yang sujana, mereka perlu dibekali kemampuan akademik dan organisasi baik intra maupun antarperguruan tinggi. Organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa menuju perluasan wawasan, peningkatan kecendekiaan, serta pengembangan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah dan pemahaman tentang arah profesi serta sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan (Depdikbud, 1998).

Dalam tulisan ini akan dikaji upaya-upaya optimalisasi pembinaan kegiatan kemahasiswaan agar kegiatan tersebut mampu meningkatkan kualitas mahasiswa, khususnya di bidang non-akademik. Peningkatan kualitas tersebut mengarah pada terciptanya mahasiswa yang memiliki berbagai kemampuan, di antaranya adalah memiliki kemampuan personal, kemampuan bekerja secara sistematis, kemampuan mengembangkan potensi intelektual, emosional dan spiritual.

PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN DENGAN PROSES HIRARKI ANALITIK

Perguruan tinggi pada hakikatnya adalah lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan calon-calon ilmuwan. Oleh karena ilmu pengetahuan itu digali dari dan hasilnya diterapkan kembali kepada lingkungan, dengan sendirinya perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Dengan demikian, perguruan tinggi

mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitarnya, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi merupakan pusat intelektual dan kultural bagi masyarakat tempat perguruan tinggi itu berada.

Dalam pembinaan kemahasiswaan, saat ini diakui masih terdapat begitu banyak kendala dan hambatan. Menurut Depdiknas (2002: 5) hambatan-hambatan tersebut mencakup: organisasi mahasiswa yang belum tertata dengan baik, iklim demokrasi-akademis di kehidupan perguruan tinggi belum terwujud, adanya campur tangan berbagai kepentingan yang sulit diakomodasikan, kesepahaman penanganan masalah oleh pimpinan perguruan tinggi belum terwujud, faktor ketidakcukupan dana sebagai legitimasi pembenaran langkah pimpinan perguruan tinggi yang kurang kondusif menegakkan demokrasi-akademis, dan kebudayaan saling mempercayai belum terbentuk di kehidupan kampus.

Ditinjau dari aspek perencanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, sebetulnya perencanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa telah mempunyai mekanisme baku, seperti tahapan penyusunan dan sumber pembiayaan yang diperoleh dari lembaga, alumni, iuran anggota dan sumber lain yang tidak mengikat. Namun dalam pelaksanaannya masih sering ditemui berbagai hambatan. Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah penentuan prioritas kegiatan. Penetapan prioritas sering dihubungkan dengan jumlah anggaran terbatas, dan dilakukan berdasarkan proposal kegiatan tanpa memperhitungkan aspek tri dharma perguruan tinggi.

Agar diperoleh urutan kegiatan yang rasional, metode yang sering dipakai untuk menetapkan prioritas dalam melaksanakan suatu kegiatan adalah dengan Proses Hierarki Analitik. Proses ini menguraikan secara spesifik bagaimana cara menentukan prioritas kegiatan, khususnya kegiatan di organisasi kemahasiswaan. Metode Proses Hierarki Analitik (*Analytical Hierarchy Process*) pada dasarnya merupakan metode

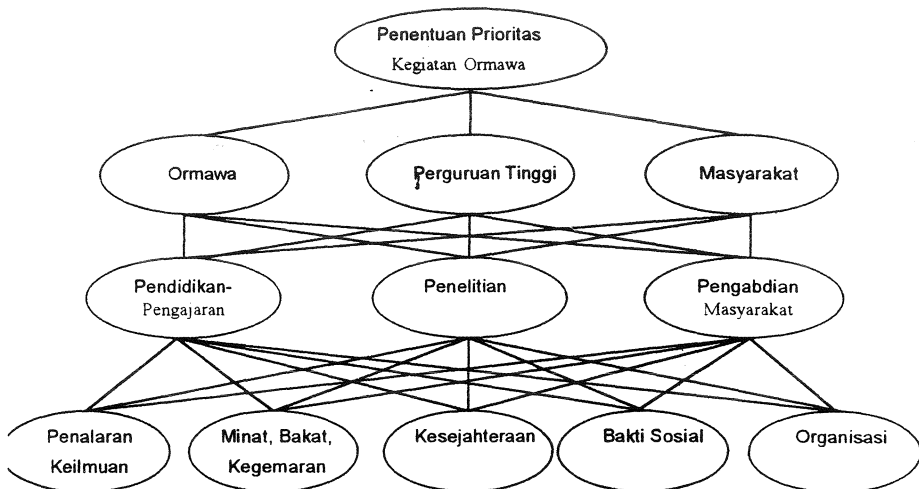
pengambilan keputusan dengan tahapan (1) memecah kompleksitas dan ketidakberaturan persoalan menjadi beberapa bagian atau komponen, (2) menyusun setiap komponen menjadi urutan yang hierarkis, (3) memberikan penilaian secara numerik akan keunggulan relatif setiap komponen, kemudian (4) melakukan sintesa terhadap penilaian yang sudah diberikan untuk menentukan komponen mana yang mendapat prioritas tertinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil kondisi tersebut (Saaty, 1993).

Untuk menggunakan metode ini, seseorang perlu mengetahui dan memahami tiga prinsip utama. *Pertama*, menggambarkan dan menguraikan komponen-komponen persoalan secara hirarki, yaitu memecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah, mengelompokkan dan menyusunnya dalam tingkatan, berbeda. *Kedua*, pembedaan prioritas dan sintesis atau penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen berdasarkan relativitas penting tidaknya suatu elemen terhadap lainnya. *Ketiga*, Konsistensi Logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diurutkan peringkatnya secara konsisten. Dengan batasan-batasan tertentu dapat diketahui apakah pengambil keputusan konsisten dalam melakukan penilaian. Jika tidak memenuhi syarat maka penilaian perlu direvisi kembali dan selanjutnya disintesa ulang.

Menurut Azhar (2002: 4) bentuk hirarkinya metode Proses Hirarki Analitik dalam penentuan prioritas kegiatan organisasi kemahasiswaan dibagi menjadi empat level, yaitu: *level kesatu* adalah fokus, yang merupakan tujuan penentuan prioritas kegiatan organisasi kemahasiswaan; *level kedua* adalah aktor, yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktor tersebut adalah organisasi kemahasiswaan, perguruan tinggi dan masyarakat; *level ketiga* adalah kriteria, merupakan ukuran yang digunakan untuk mensyarakatkan pencapaian tujuan. Kriteria yang digunakan adalah tri dharma perguruan tinggi dan dibagi menjadi tiga,

yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan *level keempat* adalah alternatif kegiatan organisasi kemahasiswaan yang akan dilaksanakan. Alternatif ini terdiri atas: penalaran keilmuan, minat bakat dan kegemaran, kesejahteraan, bakti sosial serta organisasi.

Lebih lanjut mengenai pola hubungan dan hirarki dalam penentuan kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Hirarki Penentuan Prioritas Organisasi Kemahasiswaan (Ali Azhar, 2002: 5)

Berdasarkan model hirarki yang sudah dibuat, kemudian diadakan pembobotan (*preference adjustment*) antara elemen tiap level yang mengacu terhadap elemen level di bawahnya, dan antara elemen pada level alternatif yang mengacu pada elemen di atasnya. Untuk memperoleh nilai yang cukup valid, pembobotan dilakukan oleh aktor pengambil keputusan dengan melibatkan berbagai pihak yang

dipandang ahli (*expert*) dan mempunyai kompetensi di bidang organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan hasil pembobotan diadakan perhitungan matematis baik secara manual atau memakai program komputer (paket program dan bahasa pemrograman) sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah prioritas lokal dan konsistensi tiap level, prioritas global dan konsistensi semua level, serta analisa sensitivitasnya (Expert Choice, Inc., 1995).

POLA PENDAMPINGAN/PEMBINAAN MAHASISWA SECARA SYNERGOGY

Pengembangan bidang kemahasiswaan sangat menuntut peran yang optimal dari dosen dan pejabat bidang kemahasiswaan untuk melaksanakan pendampingan/pembinaan dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Perkembangan di dalam format organisasi kemahasiswaan menuntut pula pola pendampingan/ pembinaan yang tepat yang bisa diterima oleh mahasiswa, tanpa mahasiswa merasa banyak *didikte*, dicampuri dan dikooptasi, namun tujuan dan sasaran pengembangan kemahasiswaan dapat dicapai (Fattah, 2002: 1).

Pada dasarnya, pendamping/pembina kemahasiswaan harus mengedepankan cara-cara yang edukatif, persuasif dan dialogis. Dengan demikian, pendamping lebih berperan sebagai pendidik, dan memandang mahasiswa bukan sebagai objek saja, tetapi sebagai subjek dalam proses pendidikan, memandang mahasiswa sebagai mitra, sebagai manusia yang dewasa dan mandiri. Pembimbing kegiatan kemahasiswaan bukan merupakan yang serba tahu, yang serba bisa, melainkan yang hanya sedikit lebih maju. Keberadaannya bukan sebagai atasan, melainkan sebagai *partner* yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah (Siregar, 1993:3). Membimbing/membina harus dilakukan dengan pemberian contoh nyata, merangsang dan mendorong agar yang dibimbing dapat berpikir sendiri, menyadari perasaan dan menemukan jawaban sendiri sehingga menjadi dasar untuk tingkah laku yang baru.

Dalam paradigma baru, pembina/pendamping/pembimbing kegiatan kemahasiswaan harus lebih mengetahui kondisi nyata mahasiswa yang dibimbing/dibina/didampingi. Menurut Freire dalam Fakhri (2001: 53) pembina/pendamping/pembimbing kemahasiswaan harus memiliki watak sebagai berikut: (1) kepribadian yang menyenangkan dengan kemampuannya menunjukkan persetujuan dan apa yang dipahami mahasiswa, (2) kemampuan sosial dengan kecakapan menciptakan dinamika kelompok secara bersama-sama dan mengontrolnya tanpa merugikan mahasiswa, (3) mampu mendesain cara memfasilitasi yang dapat membangkitkan mahasiswa selama proses berlangsung, (4) kemampuan mengorganisasi dari proses awal hingga akhir, (5) cermat dalam melihat persoalan pribadi mahasiswa dan berusaha memberikan jalan agar mahasiswa menemukan jalannya, (6) memiliki ketertarikan pada kegiatan kemahasiswaan, (7) fleksibel dalam merespon perubahan kebutuhan belajar mahasiswa, dan (8) pemahaman yang cukup atas materi kegiatan kemahasiswaan. Di samping itu, pembina/pendamping/pembimbing harus mampu belajar dari kenyataan atau pengalaman, tidak bersifat menggurui, dan selalu bersedia berdialog.

Untuk menjembatani kepentingan mahasiswa dengan kepentingan pendamping/pembina maka pendekatan yang dipakai dalam setiap pola pendampingan dalam mengimplementasikan kegiatan kemahasiswaan harus dapat menjamin kegiatan kemahasiswaan berjalan secara optimal. Untuk itu, Mouton dan Blake (1984) memunculkan suatu konsep *Synergogy* yang menjadi alternatif bagi proses pendampingan tersebut. Konsep ini sudah diuji dalam sejumlah bidang baik yang berkaitan dengan pendidikan, bisnis manufaktur maupun jasa dan cukup berjalan dengan efektif. *Synergogy* berasal dari bahasa Yunani yang memiliki akar kata 'synergos' dan 'agogus'. *Synergos* berarti bekerja bersama-sama (*working together*) sedangkan *agogus* berarti pemimpin dari (*leader of*) atau pembina/pendamping. Dengan kata lain, *Synergogy* merujuk pada

pengertian adanya kegiatan bersama-sama dalam berbagai pengajaran (*working together for shared learning*).

Dalam aplikasinya, pola partisipatif sangat mewarnai pendekatan ini. Mahasiswa memiliki kebebasan untuk menuangkan gagasan dan aspirasinya dalam bentuk program pengembangan kemahasiswaan yang dianggapnya baik. Dalam proses ini, mereka akan saling menguji efektivitas gagasan tersebut. Pembelajaran dipandu oleh tatanan yang sudah disepakati sejak awal oleh pendamping dengan mahasiswa. Tatanan ini perlu diwujudkan dalam bentuk tertulis sehingga mudah untuk dirujuk kembali dan dapat disesuaikan penerapannya.

Pendekatan *Synergogy* ini akan mengurangi peran pendamping untuk menjadi pusat dari proses pengembangan kemahasiswaan dan mendelegasikannya pada mahasiswa sebagai proses pembelajaran kepemimpinan bagi dirinya. Di sisi lain, pendekatan ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar mengelola diri dan lingkungannya tanpa dipenuhi bayangan ketakutan akan resiko besar yang akan ditanggungnya bila ia salah mengambil keputusan atau dalam mengoperasikan organisasinya (Sinambela, 2002: 5).

Apabila diperhatikan dengan seksama butir-butir tersebut di atas, maka pengembangan kemahasiswaan bukan masalah yang kecil dan sepele. Oleh karena butir-butir tujuan dan sasarannya sangat luas maka menuntut pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan terus-menerus. Apabila hal itu secara intensif mampu dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait dalam bidang kegiatan kemahasiswaan (mahasiswa, dosen pembimbing/pembina, birokrat) maka pada gilirannya diharapkan mampu menciptakan mahasiswa yang unggul. Adapun mahasiswa yang unggul menurut Sudarmaji (2002: 14) adalah mahasiswa yang mampu berprestasi di bidang akademik, berpengalaman di bidang ekstrakurikuler (organisasi kemahasiswaan) dan mampu meng-*goal*-kan tujuan nasional.

KESIMPULAN

Mahasiswa sebagai peserta didik dalam posisinya sebagai generasi muda sesungguhnya merupakan aset nasional dan sumber insani yang sekaligus dapat menjadi agen pembaharu. Mereka dihimpun untuk menjadi kader pemimpin masyarakat dan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pembinaan kemahasiswaan di perguruan tinggi perlu mendapat perhatian yang lebih besar dan senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu, serta disinergikan dengan berbagai bidang mencakup bidang akademik (kurikuler) dan bidang nonakademik (ekstrakurikuler).

Kegagalan dalam membangun karakter mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari pola pendampingan/pembinaan kemahasiswaan yang selama ini dilakukan oleh perguruan tinggi. Di sisi lain, kondisi dan situasi serta perkembangan masalah kemahasiswaan menunjukkan dinamika yang sangat cepat. Fenomena ini memerlukan komitmen yang tinggi pada semua pihak yang terkait mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen (pendamping/pembina mahasiswa) dan mahasiswa sendiri untuk terus memelihara keberadaan organisasi kemahasiswaan agar tetap berjalan pada jalur yang benar dan positif, sebagai kekuatan moral dan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, F. (2002). Pola Pendampingan dan Pengembangan Kemahasiswaan. *Lokakarya Nasional Pendamping/Pembina Kemahasiswaan*. Volume I No. 1 Januari 2002.
- Azhar, A. (2002). Penentuan Prioritas Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan. *Lokakarya Nasional Pendamping/Pembina Kemahasiswaan*. Volume I No. 1 Januari 2002.
- Depdikbud. (1998). *Surat Keputusan Mendikbud Nomor 155/U/1998 tentang Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan*. Jakarta: Depdikbud.

- Depdiknas. (2002). *Kebijakan Pengembangan Kemahasiswaan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Akademis dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti.
- Expert Choice, Inc. (1995). *Expert Choice Decision Support Software Tutorial Version 9.0*. Virginia: Mc Lean.
- Fakih, M. Dkk. (2001). *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Insert dan Read Book.
- Sinambela, F. C. (2002). Sinergogy: Mencari Model Pendampingan Alternatif dalam Membangun Karakter Bangsa. *Loka-karya Nasional Pendamping/Pembina Kemahasiswaan*. Volume I No. 1 Januari 2002.
- Siregar, M. F dan Hillgrad W. (1993). *Proses Pengembangan Diri*. Jakarta: Gramedia.
- Mouton, J.S., and Blake RE. (1984). *Synergogy: A New Strategy for Education, Training, and Development*. San Fransisco: Jossey Base, Inc.
- Saaty, T.L. (1988). *The Analytical Hierarchy Process*. Pittsburgh: University of Pittsburgh.
- Sudarmaji. W.S. (2002). *Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kalangan Mahasiswa*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Sudarsono. (2002). Program Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan. *Lokakarya Nasional Pendamping/Pembina Kemahasiswaan*. Volume I No. 1 Januari 2002.